

POLITIK IDENTITAS: APAKAH POLITIK IDENTITAS AKAN MEMPENGARUHI POPULARITAS? (Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Kalteng)

**Rara Triana
Rahel Liska**

Universitas Palangka Raya
Email: *Raratriana65@gmail.com*
Liskarahel@gmail.com

ABSTRAK

Permainan politik identitas dalam setiap pemilu tampaknya tidak dapat dihindari. Permainan politik dengan upaya mempertahankan kekuasaan serta untuk memikat masyarakat semakin mudah dilakukan terutama saat penggunaan isu ras, suku maupun agama di mayoritas masyarakat yang memiliki kesamaan akan isu politik identitas ini. Politik Identitas ini pun sudah menjalar ke ranah lokal termasuk kedaerah Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa wawancara serta studi literatur guna menguraikan tentang hubungan politik identitas dengan popularitas dalam pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas sudah terjadi dari zaman dahulu dan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Politik identitas yang awalnya secara terang-terangan dilakukan namun sekarang mulai dilakukan secara halus dengan permainan psikologis masyarakat. Masyarakat yang dasarnya akan berpihak pada pasangan calon yang memiliki kesamaan baik suku dan agama semakin memperkuat terjadinya politik identitas. Paradigma di masyarakat yang tidak dapat diubah bahwa yang seharusnya menjadi Kepala Daerah adalah warga asli daerah dengan harapan wakil daerah ini sebagai wadah harapan untuk memperjuangkan hak-hak warga lokal serta mempertahankan dominasi mereka. Dapat disimpulkan bahwa popularitas dari calon Kepala Daerah akan sangat memberikan dampak yang besar dalam terjadinya politik identitas. Mayoritas masyarakat akan memilih pemimpin yang mereka ketahui baik melalui agamanya maupun dari mana sukunya.

Kata Kunci: Politik Identitas, Popularitas, dan Pilkada Kalimantan Tengah.

ABSTRACT

The games of identity politics in every election seems unavoidable. Political games with efforts to maintain power and to attract the public are increasingly easy to do, especially when the issue of race, ethnicity and religion is used in the majority of people who share this issue of identity politics. This Identity Politics has also spread to the local realm, including the Central

Kalimantan region in the Regional Head Election. In research method, the researcher used qualitative methods in the form of interviews and study of literature to describe the relationship between identity politics and popularity in regional head elections. The results of the study indicate that identity politics has occurred since ancient times and is growing with the times. Identity politics, which was initially carried out openly, has now begun to be carried out subtly with people's psychological games. People who basically will side with candidate pairs who have similarities in both ethnicity and religion further strengthen the occurrence of identity politics. The paradigm in society that can't be changed is that those who should become Regional Heads are local residents with the hope that this regional representative will serve as a place of hope to fight for the rights of local residents and maintain their dominance. It can be concluded that the popularity of the candidate for Regional Head will have a major impact on the occurrence of identity politics. The majority of people will choose a leader they know either through their religion or from their ethnicity.

Keywords: Identity Politics, Popularity, and Regional Head Election in Central Kalimantan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan keberagaman dan negara Indonesia pula memiliki suku bangsa, adat budaya, bahasa, serta agama yang berbeda-beda pula di setiap wilayah-wilayahnya. Memberikan kesan menarik bagaimana masyarakat Indonesia dapat hidup bersatu didalam semua keragaman itu. Namun semakin berkembangnya zaman, dan semakin luas pengetahuan manusia, nilai persatuan itu mengalami sedikit pergeseran, dimana masyarakat mulai memiliki pemikiran bahwa ada sebuah identitas yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing daerah ataupun suku. Sebuah pemikiran yang muncul didalam benak beberapa orang bahwa perbedaan adalah perbedaan dan sulit untuk menyatukannya, pemikiran yang akhirnya menular ke banyak orang sehingga menciptakan sebuah perubahan sosial tentang kesatuan. Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun interaksial, hal inilah yang akan melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Yang paling krusial adalah identitas etnis dan agama yang memberi pengaruh besar terjadinya perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial maupun sebaliknya (Sukanto, 2010:13). Kondisi dimana suatu kelompok tertentu mulai membedakan dirinya dengan kelompok yang lain akan menciptakan sebuah sikap yang bertentangan dengan Pancasila dimana setiap warga Indonesia harus bersatu meskipun dalam perbedaan. Suatu kaum ataupun kelompok, akan mulai mencerminkan suatu etnisitas yang menggambarkan dirinya sebagai suatu kaum tertentu.

Indonesia memiliki banyak sekali suku di masing-masing daerah, begitu juga agama, di Indonesia, terdapat 6 Agama yang diakui yaitu, Kristen, Katolik, Konghucu, Budhha, Hindu dan Islam. Semua suku dan agama yang ada di Indonesia tersebar hampir keseluruh Indonesia sampai ke pelosok dalam arti bahwa hampir semua suku

kini berbaur di setiap daerah di Indonesia, yang berarti juga di satu daerah tidak lagi dihuni oleh suku asli daerah tersebut, tapi juga oleh suku-suku lainnya. Kondisi ini kemudian secara tidak langsung menciptakan sebuah perubahan sosial bahwa adanya perbedaan yang dirasakan antara suku asli dan suku pendatang dalam suatu daerah.

Isu Politik Identitas sangat penting untuk dibahas karena dalam perpolitikan dan pemilu di Indonesia, serta dalam proses demokrasi, tidak lepas dari isu politik identitas, hal ini juga ditunjukkan oleh berbagai Ideologi yang berbeda dari setiap Partai Politik, yang mana hal ini mencerminkan bahwa setiap Partai Politik mewakili suatu kaum tertentu atau kelompok tertentu. Sehingga dengan ideologi yang ikut mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang konsep kesatuan dalam keragaman, isu Politik Identitas tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu elemen yang sering dijadikan alat politik.

Sejak pasca Reformasi, kran partisipasi politik dibuka seluas mungkin, hal ini sangat menguntungkan bagi Partai Politik yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada, namun disisi lain, memberi dampak kepada beberapa elemen dalam masyarakat yang disentuh oleh kepentingan politik dan digunakan sebagai alat politik. Isu Identitas menjadi sebuah strategi yang kuat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kontestan untuk meraih suara dari masyarakat, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang memberi dampak buruk bagi kesatuan masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang bermusuhan satu dengan yang lain setelah pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, hal ini merupakan sebuah fenomena yang juga terjadi sebagai dampak dari penerapan politik identitas dalam perpolitikan.

Pada Pilkada Kalimantan Tengah 2020, persaingan dua etnis dan dua agama yang berbeda terlihat sangat jelas, yaitu suku Jawa dan suku Dayak serta agama Islam dan agama Kristen. Hal ini terjadi karena masing-masing pasangan calon memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda yaitu dari suku Jawa dan suku Dayak serta dari agama Islam dan Agama Kristen. Hal ini kemudian dijadikan sebuah alat politik dalam strategi Pilkada Kalimantan Tengah 2020. Penelitian ini berfokus pada Pilkada Kalimantan Tengah 2020 yang diikuti oleh pasangan calon Ben Ibrahim S. Bahat dan Ujang Iskandar dan Pasangan Calon Sugianto Sabran dan Edy Pratowo, untuk melihat Pengaruh Politik Identitas dalam menentukan kemenangan dari kedua Pasangan Calon tersebut. Sehingga dari fokus permasalahan yang diangkat, dapat dirumuskan pertanyaan, bagaimanakah pengaruh dari Politik Identitas terhadap Pilkada Kalimantan Tengah 2020?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur dari sejumlah data yang bersumber dari e-book, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, website maupun sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan Politik Identitas di Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berusaha menjelaskan fakta-

fakta dilapangan yang kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dalam pengumpulan data berupa wawancara, yang diwawancarai terdiri dari Tim Sukses, serta masyarakat umum yang latar belakang pendidikannya SLTA dan perguruan tinggi yang termasuk kedalam data pemilihan umum dalam pilkada kalteng 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas sudah mengakar kuat di era kehidupan politik masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaksanaan pemilu, politik identitas menjadi senjata yang kuat bagi paslon untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Menurut Abdillah (2002), Politik Identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan tas dasar persamaan-persamaan tertentu, baik persamaan agama, etnis, dan juga persamaan dalam jenis kelamin. Ditengah masyarakat yang multikulturisme, politik identitas sebagai wadah untuk menguatkan peran mereka. Setiap paslon akan selalu berusaha mengatur strategi berperang mereka dalam pemilu sehingga peranan suku, ras maupun agama menjadi senjata andalan saat berkampanye menjelang pemilu.

Meskipun politik identitas ini sudah sangat familiar, namun kenyataannya kebanyakan masyarakat tidak sadar saat seorang paslon menggunakan strategi ini untuk memikat mereka. Permainan politik yang semakin hari semakin halus baik dengan cara penyebaran kampanye melalui internet maupun melalui omongan dari mulut ke mulut membuat politik identitas ini sulit untuk dideteksi. Politik identitas paling sering dilakukan oleh partai sebab keanggotaan partai yang banyak serta pengaruh dari partai semakin mempermudah penyebaran akan isu-isu mengenai agama, ras maupun suku.

Politik Identitas Pilkada Kalteng

Dengan paradigma masyarakat dayak bahwa yang seharusnya menjadi kepala daerah adalah "Putera Dayak" semakin menguatkan bahwa politik identitas tidak dapat dihilangkan dan sudah berlangsung dari zaman dahulu. Ikatan persaudaraan maupun emosional semakin menguatkan masyarakat dayak dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Masyarakat Dayak yang aslinya memiliki kepercayaan Kaharingan yang kemudian mengasosiasikan diri dengan agama Kristiani, namun ketika ada individu atau kelompok yang memeluk agama lain diluar agama tersebut seringkali dianggap bukan masyarakat Dayak lagi. Pola pikir ini lah yang tanpa disadari menjadi benih munculnya politik identitas.

Setelah lepasnya masa penjajahan yang membuat masyarakat terpuruk baik dari segi ekonomi politik maupun budaya, masyarakat Dayak mulai bangkit dari keterpurukan. Semakin banyaknya pendatang yang memasuki pula Kalimantan membuat masyarakat dayak merasa tersaingi akan perilaku pendatang yang semakin hari semakin berusaha untuk menjadi kelompok mayoritas di pulau Kalimantan mengalahkan suku Dayak. Atas dasar perilaku ini lah, masyarakat Dayak berusaha mempertahankan solidaritas kekuatan kesukuan mereka dengan cara agar Kepala Daerah yang terpilih berasal dari Putera Dayak. Keinginan masyarakat ini bukan tanpa alasan sebab bagi mereka jika bukan masyarakat Dayak yang memegang kekuasaan maka daerah-daerah lain dapat dengan mudah dikendalikan oleh pihak luar yang bukan warga asli suku Dayak. Putera-Puteri Dayak ini menjadi harapan

untuk masyarakat dayak agar adat istiadat masih dapat dipertahankan serta agar komunitas dayak di pelosok daerah tidak merasa mereka diabaikan oleh ke rezim'an zaman. Terbukti saat Agustin Teras Narang terpilih sebagai Gubernur periode 2005-2010 dan 2010-2015 dengan identitas warga Dayak dan beragama Kristen yang menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat dapat terpenuhi. Dengan komunitas agama Islam dan Kristen yang lebih dominan justru saat terpilihnya Agustin Teras Narang terpilih sebagai Gubernur selama dua periode kedua agama ini saling mendukung, hal ini menandakan bahwa kekuatan emosional kesukuan malah saling menguatkan. Politik identitas melalui suku ini akan diikuti pengaruh agama. Kedua point tersebut akan selalu muncul setiap dilaksanakannya pemilu. Isu agama dengan paradigma di masyarakat bahwa pemimpin daerah harus seiman ditambah dengan mayoritas suku yang mendukung strategi tersebut. Fenomena ini akan tidak dapat dihilangkan sebab setiap masyarakat akan berusaha mempertahankan dominasinya sebagai wujud melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak mereka.

Organisasi yang awalnya hanya sebagai wadah untuk mempertahankan maupun menguatkan masyarakat di suatu suku tanpa disadari juga sebagai wadah yang memudahkan terjadinya politik identitas. Jika dilihat dari sisi positif, organisasi tersebut sebagai langkah untuk menguatkan peran politik warga asli. Salah satu organisasi yang terbentuk dari kebijakan pemerintah daerah adalah Dewan Adat Dayak (DAD) serta LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah). Dengan terbentuknya organisasi ini menjadi langkah awal bagi masyarakat Dayak untuk dapat berusaha memperoleh jabatan di pemerintahan dengan anggapan "Mengapa harus orang luar kalau warga asli juga berpotensi sebagai pemimpin?". Paradigma ini selalu berusaha untuk dipertahankan oleh masyarakat asli yang mendiami suku Dayak. Namun dengan adanya organisasi ini masyarakat dituntut untuk berpikir maju, berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan dominasi kekuasaan mereka dengan cara memanfaatkan isu suku, ras maupun agama. Dengan besarnya pengaruh organisasi tersebut bukan tidak mungkin bahwa organisasi tersebut dapat dengan mudah menyuarakan isu tentang kepemimpinan Putera Daerah.

Pertarungan Identitas Etnis, dan Agama dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2020

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Kalimantan Tengah merupakan sedikit banyak gambaran dari wajah perpolitikan dan Pilkada khususnya di Kalimantan Tengah. Hal dominan yang menonjol disana adalah cenderung mengarah kepada isu suku, ras, agama. Isu-isu ini menjadi sebuah kekuatan besar yang saat ini seolah di wajarkan oleh masyarakat bahkan oleh kandidat calon demi mendapatkan sebuah dukungan besar dalam pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu ras, suku dan agama sangat sensitif di sebagian besar masyarakat pemilih dan hal ini juga menjadi sebuah taktik yang sangat efektif untuk meraih kekuasaan. Masyarakat mendapatkan sebuah tekanan yang besar saat diterpa dengan isu memilih demi sebuah suku tertentu, sehingga ketika diperhadapkan dengan kandidat yang seolah memihak terhadap suatu golongan tertentu, maka secara psikologis akan menarik minat yang tinggi sebagai sebuah dampak dari perasaan bahwa kaum tersebut mendapatkan pembelaan dan perhatian khusus dari kandidat calon tersebut. Hal-hal inilah yang kemudian dilihat sebagai peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat calon dalam menarik sebanyak-banyaknya suara masyarakat pemilih.

Fenomena ini menjadi suatu masalah besar yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Dalam setiap kesempatan dan kampanye, selalu di deklarasikan bahwa tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya, tidak ada unsur suku, ras dan agama yang menjadi pembeda, semua disamaratakan dan seolah-olah nantinya ketika duduk menjadi seorang pemimpin, semua masyarakat akan diperlakukan adil tanpa melihat perbedaan apapun. Akan tetapi, ketika dibelakang layar secara halus maupun secara terang-terangan calon kandidat maupun timses dari kandidat tersebut mulai memasukan isu-isu, suku, ras dan agama dalam pikiran masyarakat, hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat dan otomatis pada akhirnya alasan masyarakat memilih suatu kandidat calon tertentu bukan lagi dari kualitas dan visi misinya akan tetapi berdasar pada suku, ras dan agama dari kandidat calon tersebut.

Masyarakat telah dimanipulasi oleh suatu konsep berpikir yang ditanamkan oleh kontestan yang menggunakan isu politik identitas sebagai suatu cara jitu mendapat dukungan. Politik Identitas menjadi suatu cara yang efektif dan jitu yang diterapkan oleh kandidat calon karena pengaruh psikologisnya yang sangat besar kepada masyarakat pemilih. Bahkan pengalaman keberhasilan penerapan politik identitas dari pilkada sebelumnya mengakibatkan politik Identitas dijadikan sebuah pondasi utama bagi kontestan untuk memenangkan pertarungan politik. Dalam hal ini, partai yang seharusnya menjadi wadah konsolidasi dan komunikasi kini bukan lagi menjadi tempat representasi semua hal itu. Politik Identitas jauh lebih besar menguasai ranah pemilu di Indonesia khususnya Pilkada Kalimantan Tengah. Suatu hal yang menjadi masalah besar dan semakin memperburuk keadaan demokrasi di Indonesia adalah, keberhasilan penerapan politik identitas di satu daerah kemudian menjadi raw model yang kemudian ditiru oleh daerah lain sebagai cara untuk memenangkan Pilkada, sehingga dampak yang muncul dari ini semua adalah semakin melebar nya segresi sosial secara horizontal.

Praktek Demokrasi yang sesungguhnya menjadi suatu hal yang semakin jauh dalam Pilkada di Kalimantan Tengah terutama pada Pilkada tahun 2020, pertarungan politik menjadi sebuah pertarungan antara lawan politik yang berpondasi pada perbedaan ras, suku dan agama, hal ini menyebabkan suatu perpecahan didalam masyarakat, sentimen terhadap kaum atau suku tertentu, terlebih kepada kaum minoritas, sehingga menciptakan suatu marginalisasi terhadap kaum yang dianggap sebagai minoritas dan yang sangat buruk adalah menciptakan sebuah permusuhan dalam masyarakat itu sendiri sebagai akibat psikologis yang disebabkan oleh politik identitas. Fasisme dan separatisme, menjadi dampak buruk lainnya dari politik identitas, masyarakat yang sudah terasimilasi oleh identitas tertentu, akan semakin mudah digunakan oleh kelompok yang ingin mencapai tujuan politiknya. Tentu saja hal seperti ini akan merusak suatu paradigma masyarakat bahwa Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam suku, budaya, bahasa dan agama dimana setiap orang harus memiliki toleransi terhadap kelompok lainnya, sebagai bentuk masyarakat yang hidup bersatu dalam keragaman. Politik Identitas yang sudah seperti mendarah daging dalam perpolitikan di Indonesia memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan selera memilih dalam masyarakat, hal yang dibutuhkan paling besar untuk melawan politik identitas adalah dengan mengutamakan sepenuhnya kepentingan publik diatas kepentingan pribadi. Dan

yang paling fatal adalah, agama yang dijadikan salah satu sarana memenangkan pemilu menciptakan konflik agama antara masyarakat, padahal sejatinya, agama selalu mengajarkan hal-hal mulia dan merupakan pedoman moral bahkan dalam menjalankan setiap Pemerintahan yang ada. Politik identitas kemudian memberikan suatu dampak negatif kepada kesatuan hidup masyarakat, demokrasi yang senantiasa diperjuangkan, justru mati akibat penerapan strategi pemenangan Pemilu yang salah dan merusak tatanan demokrasi.

Melihat kembali sejarah Kalimantan Tengah, bahwa penduduk asli Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak yang pertama kali menduduki Daerah yang dijuluki Pulau Borneo tersebut. Berdasarkan hal inilah kemudian dijadikan sebagai kekuatan Primordial oleh Cagub dan Cawagub nomor urut 1 Kalimantan Tengah pada pemilu tahun 2020, dengan identitas ini, strategi pun mulai dijalankan dengan cara memasukan pikiran-pikiran kepada penduduk etnis dayak bahwa dengan memilih Pemimpin yang etnis Dayak, agar pamor dari Suku asli Kalimantan Tengah ini tidak dikalahkan oleh suku transmigran lainnya. Pikiran-pikiran seperti inilah yang kemudian membangkitkan semangat sebagian warga etnis dayak untuk memilih Cagub dan Cawagub dengan Etnis yang sama dengan mereka. Begitu juga untuk Cagub dan Cawagub nomor urut 2 yang juga kemudian muncul dengan identitas etnis Jawa yang kemudian menarik suara warga etnis Jawa yang tinggal di Kalimantan Tengah, agar memilih pemimpin yang satu Etnis dengan mereka dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada warga transmigran agar tidak termarginalisasi oleh Pemimpin yang tidak satu Etnis dengan mereka. Dampak dari hal ini adalah adanya stereotipe yang muncul dari publik kepada masing- masing pasangan calon yang berasal dari suku yang berbeda, stereotip ini memunculkan sebuah penilaian dari banyak masyarakat bahwa Pasangan Calon nomor urut 1 yang berasal dari suku Dayak hanya akan memprioritaskan suku Dayak saja dan juga dari Pasangan Calon nomor urut 2 dianggap hanya akan memprioritaskan suku Jawa saja.

Hal lain yang juga digunakan oleh masing-masing kontestan untuk memenangkan Pilkada adalah menggunakan isu Agama. Pada Pilkada Kalimantan Tengah tahun 2020, Pasangan Calon nomor urut 1 adalah beragama Kristen, dan Pasangan Calon nomor urut 2 adalah Islam. Hal ini secara tidak langsung seolah membagi dua kelompok besar pemilih di Kalimantan Tengah yang memilih berdasarkan agama yang dianut Pasangan Calon. Fakta- fakta lapangan membuktikan bahwa masyarakat pemilih, cenderung memilih bukan karena nurani ataupun kualitas Pasangan Calon, akan tetapi berdasar pada Agama yang dianut oleh Pasangan Calon tersebut, berdasarkan data lapangan hasil wawancara dengan beberapa narasumber ditemukan fakta bahwa selama proses kampanye, banyak sekali Tim pemenangan masing-masing Pasangan Calon yang mempromosikan salah satu Kandidat dengan membawa isu Agama. Namun walaupun begitu, tidak sedikit juga masyarakat yang Cerdas dalam menentukan pilihannya berdasar dengan kualitas dari Pasangan Calon.

Pengaruh Identitas Etnis dan Agama dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2020

Pada Pilkada Kalimantan Tengah 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Sugianto Sabran dan Edy Pratowo yang merupakan Petahana. Secara identitas, Pasangan Calon ini berlatar belakang suku Jawa dan beragama Islam. Hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan, bagaimanakah pengaruh Identitas dalam

Pilkada di Kalimantan Tengah 2020. Berdasarkan Data BPS Kalimantan Tengah, agama Islam menduduki peringkat 1 dengan umat terbanyak di Kalimantan Tengah dengan jumlah 73,99 %, Kristen 19,82 %, Hindu /Kaharingan 6,03 % Budhha 0,11 %, Konghucu 0,08 % dan lainnya 0,04 %. Sehingga berdasar data ini, Agama menjadi isu yang berpengaruh dalam Pilkada Kalimantan Tengah tahun 2020. selain itu juga menurut Survei Charta Politika pada November 2020 tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pasangan Calon nomor urut 02, bahwa 21, 7 Persen masyarakat mengaku sangat puas, 57, 8 persen mengaku puas dan hanya 18, 5 persen yang mengaku tidak puas. Tingkat popularitas Petahana Nomor urut 2 mencapai hampir 75 persen yang mana ini juga memberi pengaruh terhadap selera memilih masyarakat. Kemudian hasil wawancara ke beberapa pemilih pada Pilkada tahun 2020 bahwa masyarakat cenderung memilih berdasarkan agama yang di anut oleh Pasangan Calon, sehingga jika dilihat berdasarkan jumlah data BPS bahwa agama Islam menduduki urutan pertama dengan umat terbanyak di Kalimantan Tengah, sejalan dengan Pasangan Calon nomor urut 2 adalah berlatar belakang agama Islam maka isu Agama merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh besar dalam Pilkada kalimantan Tengah 2020. Angka ini menunjukkan bahwa sebenarnya sejak awal sebelum Pilkada memberikan sebuah petunjuk kemungkinan besar menang adalah 60 persen. Indikator-indikator ini memberikan sebuah pengaruh besar terhadap elektabilitas Pasangan Calon.

Dilihat lagi dari sisi Partai Politik pengusung Pasangan Calon nomor urut 02 adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, PPP-PAN. Strategi yang digunakan Pasangan Calon Sugianto Sabran dan Edy Pratowo adalah di usung oleh partai politik berbasis islam seperti PKS dan juga PKB dan secara tidak langsung hal tersebut juga menarik massa untuk memilih pasangan calon Sugianto Sabran dan Edy Pratowo. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, orientasi politik di Pilkada Kalimantan Tengah mengarah kepada identitas etnis, ras, agama. Sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Kalimantan Tengah 2020 yang dimenangkan oleh Sugianto Sabran dan Edy Pratowo. Semua itu tidak terlepas dari pengaruh politik identitas etnis dan agama. Secara tidak langsung kedua kandidat calon ini merepresentasikan identitas masing-masing. Pasangan calon Ben Ibrahim S.Bahat dan Ujang Iskandar merepresentasikan dari etnis Dayak dan Sugianto Sabran dan Edy Pratowo merepresentasikan etnis Jawa.

Rekomendasi

Berkaca dari pengalaman setiap pilkada, politik identitas seperti sebuah magnet yang selalu berusaha menarik dukungan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Jika dilihat dari sisi positifnya, setiap orang pasti memerlukan identitas untuk mempertahankan eksistensi seperti suku mana ia berasal ataupun agama apa yang ia anuti sehingga identitas ini sebagai wujud keanggotaan dominasi di suatu hal atau pun daerah. Tapi penggunaan identitas ini pun bergantung pada individunya, politik identitas dengan permainan politik secara licik membuat tujuan dari politik identitas semakin kearah yang negatif. Menggunakan politik identitas untuk mempengaruhi masyarakat banyak seringkali didasarkan pada ketidakpercayaan diri calon-calon akan potensi dirinya sehingga menggunakan cara yang dapat menjatuhkan pihak lawannya.

Karena politik identitas tidak akan dapat dihilangkan, maka perlu suatu upaya agar masyarakat tau bahwa politik identitas dalam pilkada seharusnya tidak

digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan suara. Lembaga-lembaga yang berwenang dapat melakukan sosialisasi minimal 3 bulan sebelum pilkada berlangsung kepada masyarakat umum, sebab faktor utamanya adalah ketidaktahuan masyarakat saat calon-calon ini berkampanye sambil menggunakan strategi politik identitas. Perlu adanya aturan yang tegas bukannya hanya peringatan saja, namun hukuman yang berat saat kampanye mulai dilakukan secara licik. Peran para akademisi, pemuda-pemudi yang berlatar belakang pendidikan serta organisasi masyarakatlah yang mampu memberikan edukasi mengenai politik identitas kepada masyarakat yang awam. Masyarakat awam yang awalnya tidak mengetahui apa itu politik identitas, perlahan-lahan akan belajar hal yang baru mengenai strategi ini. Sehingga perlahan-lahan, pesta demokrasi ini dapat berjalan kearah yang lebih baik dengan kampanye yang adil tanpa menjatuhkan pihak lawan.

KESIMPULAN

Strategi menggunakan isu etnik maupun agama dalam setiap pilkada dapat dikatakan cukup berhasil untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Politik identitas yang didasari kesamaan dan mayoritas setiap individu tidak akan dapat dihilangkan. Di Kalimantan Tengah, isu politik identitas masih sangat sering dijumpai setiap pilkada dengan tujuan untuk menjatuhkan pihak lawan serta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga dalam perolehan suara pasangan calon yang menggunakan politik identitas mendapatkan suara mayoritas agar dapat memenangkan pilkada.

Politik identitas akan sangat mempengaruhi popularitas sebab ketika paslon menggunakan strategi politik identitas saat berkampanye secara otomatis popularitas dari paslon ini akan semakin bertambah seiring pengetahuan masyarakat yang mendominasi. Terbukti dengan harapan masyarakat bahwa yang seharusnya menjabat sebagai kepala daerah adalah Putera daerah maka paslon-paslon yang basicnya bukan warga asli akan mendapatkan popularitas yang sedikit, serta partai-partai akan berusaha mencari kandidat yang sesuai dengan harapan masyarakat agar peluang menang dalam pilkada semakin besar. Perilaku ini juga mempengaruhi psikologi setiap individu, ketika individu berada dikelompok mayoritas secara otomatis ia akan berusaha menyesuaikan diri agar dapat diterima kelompok mayoritas ini. Faktor ini juga menjadi penyebab kenapa politik identitas akan selalu mengakar kuat guna mempertahankan dominasi kelompok.

Partai pun juga berpengaruh dalam popularitas paslon serta penggunaan politik identitas. Partai politik yang ideologi keagamaannya lebih kuat akan berpeluang besar menarik masyarakat yang memiliki kesamaan. Melalui partai ini masyarakat menaruh harapan bahwa pilihan dari partai merupakan pilihan terbaik sehingga mayoritas masyarakat yang berpihak kepada salah satu partai tersebut akan selalu setuju dengan keputusan partai tanpa melihat apakah keputusan partai ini memberikan dampak yang positif atau negatif bagi mereka.

Politik identitas di ranah lokal seringkali dilatarbelakangi diskriminasi sehingga berupaya mengucilkan pihak-pihak kelompok tertentu. Berbagai kecurangan dilakukan agar kelompok mayoritas ini dapat mendominasi pemerintahan. Politik identitas ini pun dapat menyebabkan dapat memicu perkelahian, ketidakpercayaan antar sesama, ketidakadilan sehingga konflik sosial

yang berkepanjangan pasca pilkada yang dapat mempengaruhi aktivitas politik dielemen masyarakat. Karena itulah perlunya peran dari pemerintah, lembaga maupun organisasi hingga masyarakat yang berlatar belakang pendidikan agar dapat mengawasi setiap pelaksanaan pilkada serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa politik identitas yang digunakan secara licik dapat menjadi sumber masalah untuk bersama.

Daftar Pustaka

- Ana Sabhana dan Suryani .(2016). Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan, Jakarta:LP2M Uin Syarif Hidayatullah.
- Sukamto, 2010. Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi “Lokalitas dan Globalisasi”). Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang. Vol.2
- Idham, Suaib Amin Pranowo. (2020). Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya. Jurnal Renaissance. Vol 5 (2): 650-656
- Nasrudim, Juhana. (2018). Politik identitas dan representasi politik (studi kasus pada pilkada DKI periode 2018-2022). Jurnal Studi Agama-Agama. Vol 1 (1): 34-47.
- Liadi,H. Fimier, Desi Erawati. (2019). POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH:Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ismanto, Manggala. (2017). Penguatan identitas lokal dan penolakan vigilantisme atas nama agama. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 (3): 237-247.